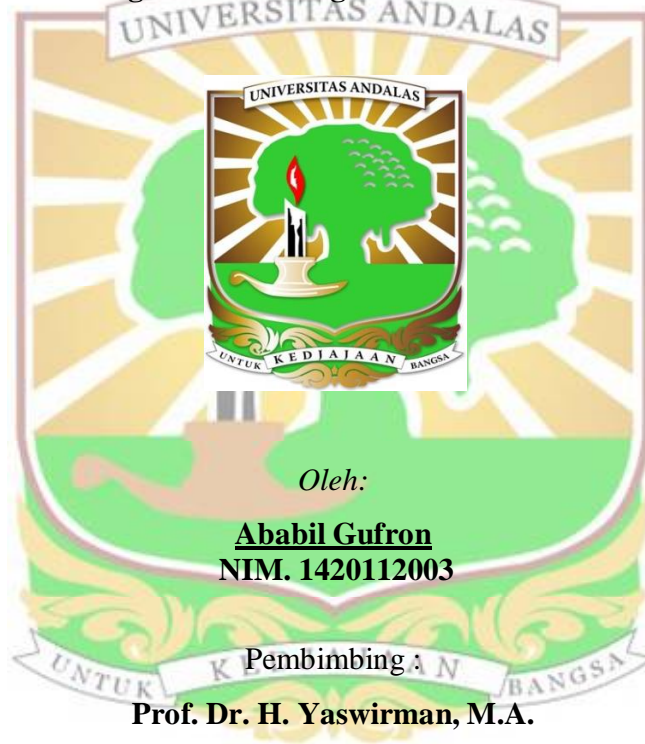


**MEDIASI PERKARA PERCERAIAN
UNTUK PEMENUHAN KEADILAN PARA PIHAK
PADA PENGADILAN AGAMA PADANG**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan Derajat S2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

MEDIASI PERKARA PERCERAIAN UNTUK PEMENUHAN KEADILAN PARA PIHAK PADA PENGADILAN AGAMA PADANG

Ababil Gufron, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNAND

ABSTRAK

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan aturan khusus berupa PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tingkat keberhasilan mediasi masih kecil, dalam realitasnya mediasi yang dilakukan oleh hakim seringkali gagal. Realitanya menunjukkan bahwa sedikit sekali kasus yang berhasil di mediasi oleh hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Data di Pengadilan Agama Padang menunjukkan bahwa dari 346 perkara yang dimediasi pada tahun 2016, hanya 11 perkara saja yang berhasil dimediasi. Sementara Mahkamah Agung selalu berupaya agar tingkat keberhasilan mediasi meningkat dengan memperbarui PERMA yang ada. Adapun permasalahan yang dikemukakan pada tesis ini, yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang? 2. Apa kaitan mediasi perkara perceraian dengan pemenuhan rasa keadilan masyarakat? 3. Bagaimana Pembagian Harta Bersama dalam mediasi perkara perceraian pada Pengadilan Agama Padang? Tipe metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode *juridis sosiologis* sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan tersebut bahwa Pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang sudah berjalan sesuai aturan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hakim mediator mempelajari penyebab konflik antara pihak berperkara dan melaksanakan mediasi sesuai aturan yang berlaku. Hakim mediator akan mengupayakan agar pihak tidak lagi bercerai dengan prinsip *ishlah* yang menginginkan setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama dapat diselesaikan secara damai. Keadilan para pihak pada pelaksanaan mediasi perkara perceraian, dapat dilihat pada proses yang telah dilalui. Meski angka keberhasilan mediasi masih rendah, namun bukan berarti mediasi yang telah dilaksanakan tidak adanya keadilan bagi masyarakat. Para pihak merasa mediasi yang dilaksanakan pada prosesnya sudah berjalan secara adil untuk kedua belah pihak. Pembagian harta bersama melalui mediasi dalam perkara perceraian masih minim, namun para pihak menginginkan harta bersama melalui mediasi karena lebih sesuai dengan keinginan masing-masing. Merujuk pada pendapat salah seorang hakim mediator dan kecilnya angka keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian, sebaiknya Mahkamah Agung melakukan penelitian berkala ke setiap lembaga peradilan agama dan melihat bagaimana proses mediasi dan angka keberhasilan.

Kata Kunci : Mediasi, Keadilan Para Pihak, Harta Bersama

MEDIATION MATTER DIVORCE TO THE FULFILLMENT OF JUSTICE THE PARTIES TO THE RELIGIOUS COURT PADANG

Ababil Gufron, Study Program Master Of Law Faculty Of Law UNAND

ABSTRACT

The Supreme Court has issued a special regulation of PERMA No. 01 of 2016 on Court Mediation Procedures, but the success rate of mediation is still small, in reality mediation by judges often fails. The reality shows that very few cases are successfully mediated by judges within the Religious Courts. Data in the Padang Religious Court shows that of the 346 mediated cases in 2016, only 11 cases were successfully mediated. While the Supreme Court always strives for the success rate of mediation to increase by updating the existing PERMA. The problems raised in this thesis are: 1. How is the implementation of mediation as regulated in PERMA Number 1 Year 2016 in the case of divorce in Religious Court of Padang? 2. What is the relationship of divorce mediation with the fulfillment of a sense of community justice? 3. How is the Division of Joint Property in the mediation of divorce cases at Padang Religious Court? The type of method used in this thesis is the sociological juridical method while the nature of the research used is descriptive. From the results of research that the authors do to the problems that have been stated that the implementation of the mediation of divorce cases in the Religious Court of Padang has been run according to the rules in PERMA Number 1 Year 2016 on Mediation Procedures in the Court. The mediator's judges study the causes of conflict between the litigants and carry out mediation under the applicable rules. The mediator's judges will seek that the party is no longer divorced from the principle of the issue that any case that goes to the Religious Courts can be resolved peacefully. Justice of the parties on the implementation of mediation divorce cases, can be seen in the process that has been passed. Although the success rate of mediation is still low, it does not mean that mediation has been implemented in the absence of justice for the community. The parties feel that the mediation carried out in the process has been fair to both parties. The division of joint property through mediation in divorce cases is still minimal, but the parties want joint property through mediation because it is more in accordance with the wishes of each. Referring to the opinion of one mediator judge and the small success rate of mediation in a divorce case, it is better for the Supreme Court to conduct periodic research into every religious judicial institution and see how the mediation process and success rate.

Keywords : Mediation, Justice of the Parties, Joint Treasure